

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Swedia merupakan negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer dengan kepala pemerintahannya yaitu seorang Perdana Menteri (PM) dan kepala negaranya yang merupakan seorang raja. Pemerintahan Swedia dipilih oleh parlemen melalui lembaga legislatif nasional Riksdag setiap empat tahun sekali. Secara geografis, Swedia terletak di Benua Eropa bagian Utara, dan berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat, serta Finlandia di timur laut. Negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional ini pertama kali mencuri perhatian dunia dengan kebijakan luar negerinya yang feminis pada tahun 2014, ketika PM Stefan Löfven, yang juga menjabat sebagai ketua umum partai Sosial Demokrat dari tahun 2012 hingga 2021, memimpin pemerintahan. Sebelum menerapkan kebijakan luar negeri feminis pada tahun 2014, kebijakan luar negeri Swedia tidak secara khusus melibatkan feminisme, fokusnya lebih pada promosi demokrasi dan kerja sama di bidang keamanan. Kegiatan Politik Luar Negeri Swedia sejak masa kepemimpinan PM Carl Bildt yang berasal dari partai Moderat pada tahun 1991-1994, hingga masa kepemimpinan PM Fredrik Reinfeldt yang juga berasal dari Partai Moderat pada tahun 2006-2014, aktif dalam kegiatan terkait demokrasi dan ekspansi Uni Eropa (UE).

Politik luar negeri Swedia berubah dengan kekuasaan Partai Moderat yang berakhir seiring dengan terpilihnya Stefan Löfven yang merupakan ketua Partai Sosial Demokrat, menjabat sebagai PM Swedia pada tahun 2014. Perubahan arah kebijakan ini pada tahun 2014 menandakan pergeseran menuju pendekatan yang lebih eksplisit dalam memasukkan aspek-aspek feminis dalam kebijakan luar negeri Swedia (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016). Stefan Löfven sendiri menjabat sebagai perdana menteri Swedia selama dua periode, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, dengan 2 Menteri Luar Negeri yang menjabat di masa kepemimpinannya, yaitu Menteri Luar Negeri Margot Wallström di periode Löfven I pada tahun 2014-2019 dan Ann Linde di periode Löfven II pada tahun 2019-2021.

Arah kebijakan luar negeri Swedia berubah seiring dengan pergantian perdana menteri dan jajaran kabinetnya. Terpilihnya Margot Wallström, seorang aktivis kesetaraan dan keadilan gender yang berasal dari Partai Sosial Demokrat, sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Löfven I memainkan peran kunci dalam mengubah arah kebijakan luar negeri Swedia. Keterlibatannya mendorong peluncuran kebijakan luar negeri feminis, menandakan komitmen Swedia untuk mengintegrasikan perspektif gender dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan di tingkat internasional (Maha, 2021).

Kebijakan luar negeri ini diluncurkan pada tahun 2015 ketika Margot Wallström menjabat sebagai menteri luar negeri, ketika Partai Sosial Demokrat membentuk pemerintahan bersama dengan Partai Hijau (Miljöpartiet).

Aggestam dan Bergman Rosamond yang telah melakukan studi terkait Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia berpendapat bahwa kebijakan tersebut berkaitan erat dengan pengaruh dari Margot Wallström (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016).

Swedia sendiri sejak dahulu telah memiliki sejarah dengan kebijakan luar negeri aktivisnya. Sebagai negara non blok pada masa Perang Dingin, Swedia berusaha menjadi panutan internasional dengan menerapkan kebijakan luar negeri aktivisnya. Pemahaman diri Swedia dibentuk dalam masyarakat sejahtera yang difasilitasi melalui negara kuat yang dibentuk oleh kesetaraan dan partisipasi. Bagi Swedia, hak asasi manusia telah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Salah satunya adalah, dengan menempatkan hak-hak perempuan sebagai prioritas utama dalam kebijakan tersebut (Larasati, 2018).

Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven didasarkan pada prinsip dasar tentang kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan, yang secara sistematis seringkali diabaikan. Kebijakan luar negeri feminis Swedia ini pada hakikatnya merupakan sebuah metode kerja dan perspektif yang mengambil 3 (tiga) R berdasarkan R keempat yang menjadi pilar serta titik awal dan menjadi fokus utama dalam implementasinya. Tiga R tersebut yakni *Rights* (hak), *Representation* (representasi), dan *Resources* (sumber daya) berdasarkan *Reality* (realitas). Pilar ini juga menjadi fondasi bahwa dalam implementasinya, kebijakan luar negeri feminis juga harus

mempromosikan tindakan yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok dengan sasaran yang berbeda berdasarkan realitas tempat mereka tinggal.

Dalam pedoman mengenai Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia, dijelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada prinsip interseksionalitas. Interseksionalitas mencerminkan pemahaman bahwa setiap masyarakat memiliki kondisi kehidupan, tingkat pengaruh, dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan variasi tersebut dalam merumuskan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman kondisi di masyarakat.

Negara-negara yang menerapkan kebijakan luar negeri berlandaskan feminisme seperti Prancis dengan *Feminist Foreign Diplomacy* (FFD), Meksiko dengan kebijakan luar negeri feminisnya, dan Kanada dengan *Feminis International Assistance Policy* (FIAP) memiliki pendekatan yang berbeda. Swedia fokus pada ketidaksetaraan gender, FIAP Kanada mengidentifikasi kemiskinan, dan FFD Prancis menitikberatkan pada Agenda PBB 2030. Meksiko melihat kesetaraan gender bukan hanya sebagai solusi untuk masalah global, tetapi juga sebagai tujuan sulit dicapai, karena faktor seperti diskriminasi rasial, isu migrasi, dan dampak perubahan iklim (Zhukova, Sundström, & Elgström, 2022, hal. 213-214).

Penelitian ini mengacu pada kajian literatur terdahulu yang terkait dengan pembahasan mengenai Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia. Sebagai contoh, karya Stephanie Lobos Poblet dalam penelitiannya

menjelaskan konsep dasar Swedia dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis. Pemahaman tersebut didasarkan pada konsep gender dan feminisme dalam perspektif pemerintah Swedia (Poblete, 2018). Kemudian literatur yang kedua merupakan literatur oleh Christian Antoni Möllerop yang berjudul yang membahas mengenai *action plan* dari kebijakan luar negeri feminis Swedia (Möllerop, 2016).

Selanjutnya, karya Avina Alifvioni yang mengemukakan bahwa Swedia sebagai negara feminis menjalankan politik luar negerinya dengan menggunakan *gender mainstreaming* dan membantu meningkatkan representasi perempuan dalam partisipasi politik di negara-negara berkembang (Alifvioni, 2018). Kemudian literatur oleh Irayomi F Maha yang menganalisis mengenai kebijakan luar negeri feminis Swedia di tahun 2014-2018 (Maha, 2021). Terakhir, penulis menggunakan sumber literatur pustaka dari dokumen atau buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Swedia, yakni *Sweden Feminist Foreign Policy Handbook* yang berisikan pengertian umum dan tujuan perancangan kebijakan luar negeri feminis Swedia, beserta metode kerja (*working methods*) untuk mencapai kesuksesan dalam pengimplementasian tiga pilar dalam FFP Swedia (Government Offices of Sweden Ministry for Foreign Affairs, 2018).

Dari beberapa tinjauan literatur terdahulu, maka penulis menemukan gap penelitian yakni, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai penerapan kebijakan luar negeri feminis Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven tahun 2014-2021, serta belum ada juga yang menganalisis

implementasi 3R dalam kebijakan luar negeri tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam terkait dengan topik mengenai implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di masa kepemimpinan PM Stefan Löfven layak diangkat untuk menjadi objek penelitian skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti dapat mengemukakan sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di masa kepemimpinan Stefan Löfven tahun 2014-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menuntaskan Tugas Akhir pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Hubungan Internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus. Yang pertama yaitu itu untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi Swedia untuk meluncurkan kebijakan luar negeri feminis. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan luar negeri feminis Swedia di masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021. Yang ketiga, melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan

tiga pilar *Feminist Foreign Policy* yakni *Rights, Resources*, dan *Representation* dalam implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021. Yang terakhir, penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca terkait dengan Kebijakan Luar Negeri Feminis yang diadopsi oleh Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Pemikiran

1.4.1.1 Konsep Feminisme

Feminisme menurut Wolf (1994) merupakan suatu teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Dalam pandangan ini, feminisme tidak hanya membahas isu-isu struktural atau sistemik, tetapi juga menekankan pengakuan nilai pribadi dan martabat individu perempuan. Goefe dalam Sugihastuti (2003) mengartikan feminisme sebagai suatu teori yang berkaitan dengan pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, sosial, atau dalam aktivitas organisasional yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Budiantara (2002) mendefinisikan feminisme sebagai kritik ideologis terhadap sudut pandang yang mengabaikan kesenjangan dan ketidakadilan dalam menentukan peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan

gender. Pada hakikatnya, konsep feminisme dapat diartikan sebagai kesadaran akan adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam masyarakat.

Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah (2003) dalam bukunya yang berjudul "Revisi Politik Perempuan," menggambarkan feminisme sebagai suatu paham yang melibatkan kesadaran terhadap pemikiran dan eksploitasi perempuan dalam berbagai konteks, termasuk dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat, yang juga mencakup kesadaran baik dari laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berupaya mengubah situasi tersebut. Definisi feminisme dapat mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh pemahaman atau pandangan individu feminis yang berakar pada realitas historis dan budaya, serta tingkat kesadaran terkait persepsi dan perilaku.

Gagasan-gagasan feminisme muncul sebagai respons terhadap konstruksi sosial gender yang mendukung aspirasi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan kesadaran terhadap ketidaksetaraan dalam struktur, sistem, dan tradisi masyarakat menjadi landasan bagi kritik feminis yang muncul.

Feminisme dalam Hubungan Internasional muncul pada akhir 1980an sebagai kritik terhadap realis. Kritik kaum feminis menyoroti cara pandang realis terhadap keamanan, sebagai contoh, bagaimana perspektif maskulinis membentuk pemahaman mereka terhadap dunia. Keamanan dalam perspektif realis didasarkan pada pertahanan militer negara dalam konteks anarki internasional. Namun, kritik dari perspektif feminis menyoroti bahwa keamanan realis sering mengabaikan hierarki gender dalam politik global. Ini berarti bahwa perlindungan dari ancaman luar juga mencerminkan perlindungan terhadap yurisdiksi domestik, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan subordinasi terus-menerus terhadap kaum perempuan (Sylvester, 1994).

Burchill (2005) berpendapat bahwa feminisme menganggap Hubungan Internasional terlalu banyak berfokus pada isu-isu yang bersifat maskulin, seperti perang atau perlombaan senjata, dan bahwa dalam praktiknya hal ini merugikan perempuan. Sejak tahun 1980-an, para ahli feminis dalam bidang Hubungan Internasional telah memberikan wawasan baru dan menarik tentang politik global. Hubungan internasional memainkan peran kunci dalam membentuk pola hubungan gender, termasuk dinamika gender yang mempengaruhi proses-proses seperti globalisasi, militerisasi, dan ekonomi global (True, 2005).

Definisi-definisi mengenai feminisme menjadikan gerakan feminis memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun dan mewujudkan kesetaraan yang sama dengan para laki-laki bagi para perempuan dalam berbagai sektor seperti sektor politik, ekonomi, sosial maupun personal. Jacqui True (2005) kemudian membedakan feminisme untuk mendefinisikan kontribusinya dalam Hubungan Internasional: (1) *empirical feminisme*, yang secara khusus memusatkan perhatian pada perempuan dan/atau menyelidiki gender sebagai aspek empiris dalam konteks hubungan internasional.; (2) *analytical feminism*, yang memanfaatkan gender sebagai kerangka teoritis untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam konsep Hubungan Internasional dan menjelaskan elemen-elemen konstitutif dari bidang tersebut; (3) *normative feminism*, merupakan feminisme yang mencerminkan proses berteori sebagai bagian dari agenda normatif untuk perubahan sosial dan politik.

1.4.1.2 *Feminist Foreign Policy* (FFP)

Feminist Foreign Policy (FFP) atau Kebijakan Luar Negeri Feminis merupakan suatu kebijakan yang pertama kali dirintis oleh Swedia pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengubah praktik kebijakan luar negeri agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan, di mana pun, sehingga berdampak pada diplomasi, kerjasama pada bidang pertahanan dan

keamanan, bantuan, perdagangan, keamanan iklim, dan bahkan kebijakan imigrasi di suatu negara (UN WOMEN, 2022). Sedangkan Judith Butler (1993) dalam bukunya yang berjudul “*Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex*”, mendefinisikan FFP atau Kebijakan Luar Negeri Feminis sebagai rumusan aksi yang dilakukan terhadap pihak di luar batas nasional yang didasarkan pada komitmen untuk mencapai kesetaraan gender, dan bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah dominasi pria.

FFP memerlukan beberapa penerapan perspektif kesetaraan gender yang sistematis dalam kebijakan luar negerinya. Salah satu titik awalnya adalah bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah tujuan tersendiri, namun hal ini juga penting untuk mencapai tujuan keseluruhan pemerintah lainnya, seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pedoman kebijakan luar negeri dapat divisualisasikan secara praktis melalui serangkaian penanda berikut; dialog politik, ekonomi politik dengan perspektif feminis, keselamatan dan kesejahteraan personal, komunitas empatik, inklusivitas, dan analisis gender yang mempertimbangkan interseksionalitas (Scheyer & Kumskova, 2019).

Dalam literatur yang sama, Scheyer dan Kumskova (2019, hal. 61) menguraikan mengenai penerapan FFP lebih jauh; Dialog

politik melibatkan pembicaraan dan interaksi politik dalam resolusi konflik, diplomasi, dan perdagangan. Pendekatan feminis untuk penyelesaian konflik melibatkan analisis gender, partisipasi suara yang terpinggirkan, dan komitmen pada perlucutan senjata. Kemudian keselamatan dan kesejahteraan personal dimana studi keamanan yang dimaksud feminis menggeser fokus dari konsep keamanan tradisional ke arah perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan individu berdasarkan gender. Ini mencakup keamanan fisik, sosial, dan politik, serta pemenuhan kebutuhan dasar sosial.

Kemudian dengan membangun komunitas yang empatik, seperti bergabung dalam aliansi internasional dan/atau supranasional bukan untuk militer dan kekuatan, melainkan untuk tujuan bersama seperti perdamaian, perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan, atau perjanjian mengenai perlucutan senjata. Inklusivitas dan pendekatan interseksional dalam Feminist Foreign Policy memprioritaskan keahlian dan pengalaman masyarakat sipil serta komunitas lokal. Identifikasi dan keterlibatan aktor-aktor ini esensial dalam pembuatan kebijakan. Yang terakhir yaitu analisis gender. Analisis gender penting diterapkan pada konsep keamanan, aliansi militer, dan militerisme. Analisis gender penting untuk memahami ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, rentan terhadap kekerasan, dan dampak

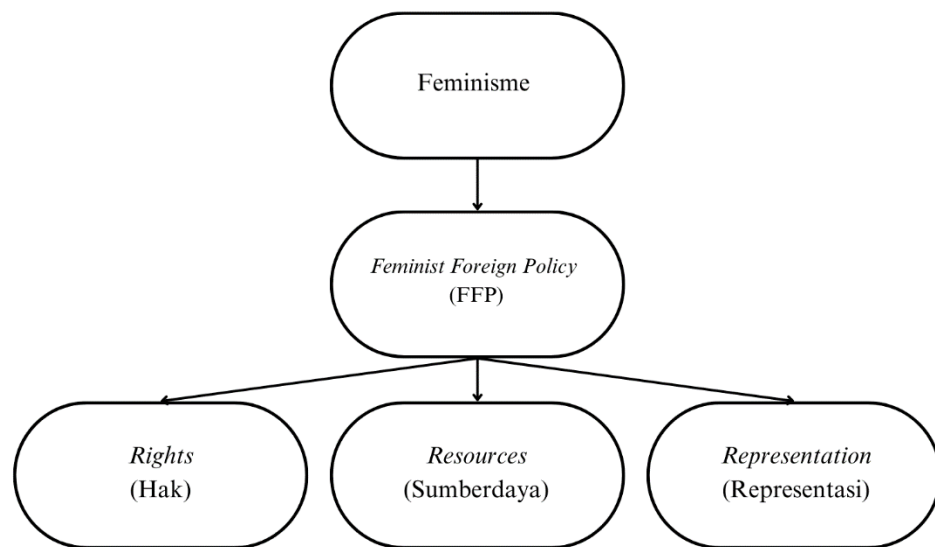
politik pada berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, analisis gender menjadi landasan kunci dalam metodologi FFP (Scheyer & Kumskova, 2019, hal. 64).

Norma-norma yang mendasari FFP telah dituangkan dalam konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan publik, dan memberdayakan perempuan secara ekonomi (Alwan & Weldon, 2017). Meskipun berbasis norma, FFP juga merupakan suatu kebijakan yang pragmatis. Meskipun menggunakan kata ‘feminis’, FFP tidak hanya bertujuan untuk agenda aktivis saja (Zhukova, Sundström, & Elgström, 2022). Hal ini juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan di seluruh dunia dalam sistem yang berorientasi pada pertumbuhan dan patriarki.

1.5.2 Sintesa Pemikiran

Dengan memperhatikan dan merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran, penulis dapat menarik dan menggambarkan sintesa pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Sintesa Pemikiran



Sumber: (Analisa Penulis, 2023)

Bagan sintesa pemikiran di atas berperan penting untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan mengenai implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis. Bagan tersebut menunjukkan bahwa Konsep Feminisme melahirkan FFP (Kebijakan Luar Negeri Feminis) yang kemudian dalam implementasinya menggunakan tiga pilar untuk tercapainya tujuan dalam FFP, yaitu 3R (*Rights, Representation, and Resources*).

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa Selama masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021, Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia, menggunakan tiga pilar FFP yang menjadi fokus utama dalam implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia, yakni *rights* (hak), *representation* (keterwakilan), dan *resources* (sumberdaya). Dalam hal *Rights* (hak), Swedia berkampanye untuk akses kesehatan dan hak seksual serta reproduksi

perempuan dan anak perempuan dalam Resolusi Majelis Umum mengenai anak dini dan anak yang dipaksa menikah, serta memperkuat penikmatan hak asasi perempuan dan anak perempuan migran, dan juga pengungsi. Dalam hal *Representation* (keterwakilan), Swedia telah membantu dalam mengaktifkan jaringan mediator perempuan di seluruh dunia, memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan di dewan keamanan PBB, serta meningkatkan representasi perempuan dalam proses perdamaian dan sistem hukum. Dalam hal *Resources* (sumberdaya), Swedia telah membantu dengan berkontribusi pada peningkatan aspek kesetaraan gender, melalui intensifikasi kerjasama bilateral dengan tujuan memperkuat peran dan hak-hak perempuan dalam pasar tenaga kerja di berbagai negara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan menjelaskan implementasi 3R (*rights, representation, and resources*) dari Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021. Penelitian deskriptif menurut Nazir (1988) Penelitian deskriptif, menurut Nazir, adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, kondisi, objek, sistem pemikiran, atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa saat ini. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, sifat, atau keadaan dari subjek penelitian tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi yang diteliti. Penelitian

deskriptif cenderung fokus pada pengumpulan data deskriptif, seperti survei, observasi, atau analisis dokumen, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena yang tengah diteliti, yang dengan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif untuk meneliti mengenai implementasi 3R dari Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven tahun 2014-2021.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah tahun 2014-2021. Penelitian ini mengambil jangka tahun tersebut dikarenakan kebijakan luar negeri feminis Swedia yang diluncurkan oleh Swedia pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven dan berakhir pada tahun 2021 saat masa jabatan Stefan Löfven berakhir.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, berita, jurnal, artikel, dan laporan tahunan resmi milik pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi pustaka dengan tinjauan literatur yang sudah ada sebelumnya berupa buku-buku, dan juga laporan data mengenai topik yang diteliti, serta situs dari internet. Peneliti melakukan observasi terhadap topik yang diteliti dengan melakukan observasi non partisipatif. Observasi non operatif menurut Riyanto (2010) merupakan tindakan

penelitian yang dilakukan apabila seorang peneliti tidak ikut serta dalam penelitian observes.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menganalisis implementasi 3R pada FFP Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021. Teknik analisis data kualitatif mengolah data tidak hanya berdasarkan dengan skoring angka, tetapi juga rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara, dimana teknik analisis ini memberikan penjelasan terhadap topik yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif ini karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang berupa kata-kata dan tidak dapat dikuantifikasikan. Data yang diperoleh peneliti kemudian di analisis untuk menjawab rumusan masalah dan juga menguji argumen utama yang telah ditulis dalam bentuk sebuah kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini berisi pemaparan yang dirinci dalam 4 bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub babnya masing-masing.

BAB I pada penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis atau argumen utama penulis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II pada penelitian ini, penulis menjabarkan mengenai implementasi FFP Swedia dalam hal *Rights* pada tiga pilar Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021.

BAB III pada penelitian ini memaparkan mengenai implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia dalam hal *Resources* dan *Representation* pada masa kepemimpinan PM Stefan Löfven pada tahun 2014-2021.

BAB IV pada penelitian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya.